



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); 2. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT); 3. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes).
Hari/Tanggal	: Senin, 19 Januari 2015.
Pukul	: 16.35 – 18.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H. Nuroji/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, S.H/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan tentang Ujian Nasional dan Kurikulum 2013; 2. Pembahasan mengenai akreditasi perguruan tinggi; 3. Pembahasan terkait perubahan kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLPT); 4. Lain-lain.
Hadir	: 39 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir dari	: 1. BSNP : Bambang Suryadi beserta jajarannya; 2. BAN-PT : Prof. Mansyur Ramly beserta jajarannya; 3. LAMPTKES: Usman Chatib beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 16.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H. Nuroji, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan oleh BSNP, BAN-PT dan LAMPTKES, sebagai berikut:

A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Persiapan dan penyelenggaraan UN Tahun 2015 serta pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) yaitu:

1. Ujian Nasional 2015.
 - a. Berdasarkan PP No.19/2005 dan perubahannya PP No.32/2013, BSNP merupakan penyelenggara Ujian Nasional telah menyusun kebijakan persiapan dan penyelenggaraan UN 2015.
 - b. Ujian Nasional sebagai sub-sistem penilaian pendidikan baik di tingkat mikro/sekolah/kelas maupun di tingkat makro/nasional perlu selalu ditingkatkan dan disempurnakan baik dari sisi sistem penilaian maupun dari sisi peningkatan anggarannya.
2. Kurikulum 2013 (K-13), perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa aspek, yaitu
 - a. pelatihan guru;
 - b. pengadaan dan pendistribusian buku teks pelajaran;
 - c. penilaian;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. sistem manajemen satuan pendidikan; dan
 - f. sistem remunerasi.

B. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).

1. Prosedur akreditasi, secara umum proses akreditasi memerlukan waktu 53 hari kerja;
2. Beban kerja akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi tahun 2015 masih belum dapat diselesaikan karena kurang alokasi anggaran. Misalnya, untuk tahun 2014, terdapat permohonan akreditasi prodi sebanyak 6.798 yang terealisasi hanya 5000, sisanya sebanyak 1.798 menjadi beban di tahun berikutnya.
3. Telah melakukan analisis data akreditasi untuk program studi nasional sebanyak 19.278 prodi yang terinci sbb:
 - a. program studi PTN sebanyak 6.070;
 - b. program studi PTS sebanyak 13.208.

C. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes).

1. Kelembagaan LAMPTKes merupakan realisasi amanat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta untuk menjawab tuntutan kebutuhan globalisasi industri pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan.
2. LAMPTKes merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi khususnya prodi kesehatan.
3. Untuk mencapai tujuan LAMPTKes yaitu budaya peningkatan mutu berkelanjutan (*culture of continous quality improvement*) masih diperlukan bantuan dari Pemerintah untuk ketersediaan asesor dan alokasi anggaran.

D. Seluruh masukan dan usulan BSNP, BAN-PT, dan LAMPTKes merupakan bahan yang tidak terpisahkan untuk disertakan dalam pengambilan kebijakan pada rapat dengan Pemerintah.

III. **PENUTUP.**

Rapat ditutup pada pukul **18.30 WIB.**

Jakarta, 19 Januari 2015
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
WAKIL KETUA,



IR. H. NUROJI